

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

1.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu konsep yang ada sebagai sebuah bagian dari pengembangan pikiran dan kebudayaan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan proses dari pembangunan sumber daya atau masyarakat yang dibentuk melalui adanya kemampuan secara pribadi, kompetisi dan pikiran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan adalah salah satu factor penting yang dilaksanakan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekoomi dan berpengaruh pada tingkat kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Sulistiyani dalam Soraya (2021) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini berasal dari kata “daya” yang memiliki makna kemampuan. Merujuk pada makna tersebut, aka pemberdayaan diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk berdaya dan memperoleh daya, kekuatan atau keahlian yang dimiliki seseorang karna kurang berdaya dirinya.

Pemberdayaan dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan guna memberikan bantuan kepada khlayak ramai untuk mengembangkan kemampuannya sehingga dapat memperoleh solusi dan mengambil keputusan sendiri. Pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan bagi Lembaga masyarakat supaya mampu untuk mengelola serta menghadapi berbagai rintangan di masa depan secara sendiri (Sunartiningsih 2004, hlm. 50).

Suharto (2005:60) berpendapt bahwa pemberdayaan memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi masyarakat diantaranya:

- a. Harus mampu menyediakan kebutuhan yang bebas. Artinya, masyarakat dapat secara bebas untuk terlepas dari rasa lapar, pemikiran yang bodoh dan sakit.
- b. Dapat terpaut pada sumber yang produktif sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup baik yang bersumber dari pendapatan, jasa dan barang.

- c. Adanya keterlibatan masyarakat memberikan dampak pada proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

1.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat sendiri adalah sebagai benteng pertahanan bagi kelompok lemah yang mempunyai ketidakberdayaan secara internal dan eksternal. Soejono Soekanto dalam Sulandjari dkk (2021).

Menurut Suharto dalam Sulandjari dkk (2021), ada beberapa kategori kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok yang lemah menurut structural seperti lemah etnis, gender, kelas.
- b. Kelompok lemah dengan kategori khusus, seperti anak-anak, kondisi cacat, pelaku penyimpangan sosial dan masyarakat terasing
- c. Kelompok dengan kategori lemah personal yaitu masyarakat yang memiliki masalah pribadi

Maka tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat mandiri. Artinya, masyarakat dapat mandiri secara pemikiran, tindakan dan apa yang akan dilakukan. Tujuan pemberdayaan masyarakat (Jamasy, 2004) yaitu:

- a. Adanya masyarakat mandiri
- b. Terdapat masyarakat yang sadar akan potensi yang dimiliki
- c. Memiliki lingkungan yang baik sehingga dapat menciptakan kondisi yang sehat dan saling menguntungkan
- d. Memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan
- e. Menambah kemampuan berpikir atas berbagai masalah yang dihadapi
- f. Penurunan angka kemiskinan dan adanya peningkatan potensi dasar masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan integrasi sosial diantaranya:

- a. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*)

Lembaga yang memiliki reputasi baik mampu memberikan pengaruh untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi sehingga Lembaga dapat secara penuh menjalankan fungsinya.

b. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan usaha dimaksudkan untuk memberikan rasa puas kepada anggota dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

c. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Perbaikan yang dilakukan berupa adanya manajemen keuangan sehingga hal ini mampu memperbaiki pendapatan masyarakat dengan cara atur usaha yang benar.

d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Adanya perbaikan pada pendapatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat, hal ini memberikan motivasi untuk adanya perbaikan secara lingkungan baik fisik ataupun sosial sebab terjadinya sebuah kerusakan akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan pendapatan yang semakin mengecil.

e. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik maka masyarakat harus meningkatkan pendapatan serta didukung dengan lingkungan yang baik agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Jika semua faktor sudah di perbaiki maka masyarakat akan otomatis membaik dengan sendirinya, karena pondasi dari semua masalah sudah di perbaiki dengan baik.

1.1.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah cara yang dilakukan dalam rangka memberantas kemiskinan serta proses untuk meningkatkan kesejahteraan secara terbuka supaya masyarakat memiliki kepercayaan diri pada potensi yang dimilikinya. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Hikmat H. (2004):

- a. Pertumbuhan masyarakat mengacu pada besarnya partisipasi yang ada
- b. Kerasahan yang dirasakan masyarakat menjadi acuan untuk perencanaan program
- c. Adanya ketidakpuasan yang terjadi di masyarakat harus ditemukan solusi pemecahan masalahnya.

- d. Komunitas yang menjadi penggerak harus memiliki jalur komunikasi yang efektif dan efisien sehingga mampu melaksanakan prosedur kerja dengan fleksibel namun tidak mengganggu pengambilan keputusan mereka.
- e. Program yang akan dilaksanakan harus mengacu pada kepuasan yang akan dirasakan oleh penerima program

1.1.1.4 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto dalam Sulandjari dkk (2021) tahapan pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan ialah:

- a. Tahapan persiapan. Tahapan ini mengacu pada adanya perencanaan tugas, sumber daya yang siap.
- b. Tahapan pengkajian (*assesment*). Tahapan ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh masing-masing untuk mengidentifikasi permasalahan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.
- c. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Tahapan yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat untuk sama-sama berpikir mengenai program yang dapat dilaksanakan.
- d. Tahapan pemformalisasi rencana aksi. Suatu kelompok perubahan akan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Disamping itu agen perubahan juga membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis.
- e. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Tahapan ini mengacu pada pelaksanaan program yang harus mengikutsertakan masyarakat sebagai kader dalam menjaga keberlangsungan program yang ada serta tidak melenceng dari perencanaan.
- f. Tahapan evaluasi. Tahap evaluasi merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas program untuk dapat membentuk sebuah komunitas pengawasan yang dapat membangun komunikasi secara efektif.
- g. Tahapan terminasi. Tahap terminasi adalah tahapan pemutusan hubungan sebab program akan segera berakhir.

1.1.1.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto dalam Sulandjari dkk (2021) indikator pemberdayaan adalah alat yang mampu menunjukkan sebuah kondisi yang menjadi perhatian. Pemberdayaan ini meliputi tiga dimensi yaitu kompetensi rakyat, kemampuan sosio politik dan kompetensi partisipatif.

Indikator keberhasilan yang digunakan untuk tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan penduduk miskin
- b. Usaha yang berkembang sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
- c. Adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami kesejahteraan warga di lingkungan sekitar
- d. Semakin besarnya kemandirian masyarakat dalam modal usaha, system administrasi yang bersih dan luasnya hubungan antar kelompok
- e. Peningkatan kemampuan distribusi pemasukan masyarakat dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sosial (Sumodiningrat, 1999)

1.1.1.6 Strategi dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan menurut Sulistiyani dalam Soraya (2021) ialah:

- a. Sebagai suatu upaya dalam peningkatan kemampuan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup
- b. Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan berarti meningkatnya pemberdayaan merupakan adanya peningkatan keahlian serta mandiri masyarakat supaya dapat dikembangkan serta memperkuat sumber daya yang ada untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ginanjar dalam Yakob Napu (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana atau lingkungan yang yang mampu memberikan perkembangan pada masyarakat
- b. Kuatnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sebuah langkah untuk membuka akses pada setiap peluang sehingga menjadi berdaya.

- c. Proses pemberdayaan harus mampu melindungi yang lemah dimana kurangnya keberdayaan untuk menghadapi yang kuat.

1.1.1.7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Gotong royong merupakan sebuah kondisi dimana satu dengan lainnya harus bekerja secara bersama-sama dalam bidang pemabngunan yang merujuk pada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan adalah langkah yang dilakukan untuk mendorong semngat masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada keswadayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Desa Pusakasari merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan cipaku Kabupaten Ciamis. Dimana wilayah ini mempunyai potensi seperti potensi pada bidang pertanian, jasa dan lainnya. Desa Pusakasari termasuk ke dalam kategori “Desa Swambada” sebab desa ini merupakan pemekaran dari desa buniseri. Nama Pusakasari memiliki makna sarinya barang Pusaka dengan empat unsur utama yaitu Dusun Urug, Lengkong, Landeuh dan Tonggoh. Selain itu, objek wisata yang ada di Desa ini salah satunya terowongan air pasir yang berada di Dusun Lengkong. Dengan luas wilayah 354.341 km dan jumlah penduduk sekitar 5088 jiwa, Desa Pusakasari masuk kedalam daftar Desa Mandiri pada tahun 2021. Dikutip dari artikel ciamis.info Desa Pusakasari masuk dan terdaftar sebagai Desa mandiri berdasarkan penilaian atas kriteria IDM (Indeks Desa Membangun) bersama 44 Desa lainnya.

a. Pengorganisasian Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pasal 5 sampai pasal 9. Dimana pada pasal 5 memuat dua ayat yaitu:

- 1) Pemerintah membuat tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dengan formasi di dalmnya yaitu Lembaga pemerintah, LSM, dunia usaha, departemen.
- 2) Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada provinsi dalam hal pelaksanaan dan pengendalian BBGRM.

b. Bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Bidang-bidang ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1-4, yaitu:

- 1) Kegiatan gotong royong masyarakat yang memuat penguatan system peningkatan keamanan lingkungan, pembangunan masyarakat, perlindungan masyarakat di desa kelurahan, adanya keilmuan tentang mencintai tanah air, penertiban masyarakat yang berkaitan tentang kesadaran bayar pajak, pergerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya.
- 2) Kegiatan gotong royong di bidang ekonomi yang meliputi adanya pengembangan fasilitas UKM, fasilitas pengembangan Lembaga simpan pinjam, pengembangan budidaya pertanian, budaya menabung, pembangunan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.
- 3) Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama yang meliputi penyuluhan kesehatan, pelayanan kesehatan, bantuan bagi lansia, pembangunan dan pemeliharaan kesehatan.
- 4) Di bidang lingkungan, gotong royong yang dilakukan adalah dengan adanya pembangunan serta pemeliharaan dari prasarana lingkungan, air bersih serta kesehatan pemukiman dan reboisasi.

Dalam hal ini tentu keterlibatan pemerintah sangat penting sehingga kegiatan dari program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) mampu terlaksana dengan baik. Maka perlu adanya peran yang mendukung secara signifikan.

a. Peran Pemerintah

Pada konteks pendampingan masyarakat, terdapat peran yang menurut Zubaedi (2013) menjadi tanggung jawab dari pelayan masyarakat, yaitu:

- 1) Sebagai motivator. Maksudnya adalah sebagai seorang pendamping memiliki keharusan untuk menggali potensi dari sumber daya yang ada. Selain itu, harus mampu mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi.
- 2) Sebagai komunikator. Peran ini, pendamping wajib untuk menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber di masyarakat supaya mampu menjadikan rumusan dalam melaksanakan beragam pemecahan masalah.

- 3) Sebagai fasilitator. Peran pendamping sangat berperan untuk memberikan arahan dalam penggunaan berbagai taktik, strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

1.1.2 Integrasi Sosial

1.1.2.1 Pengertian Integrasi Sosial

Adanya dinamika serta perkembangan masyarakat dalam tata kelolanya memiliki kecenderungan meningkat dengan arah dan tujuan yang tidak pernah terduga. Dalam tatanan umum, tatanan dunia dibentuk berdasarkan pada penghalangan hambatan struktural sehingga dunia dapat dipandang seolah-olah tidak memiliki batas. Kondisi ini dapat memperlihatkan impaknya terhadap dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat yang dalam kondisi tertentu cenderung sulit untuk dikendalikan.

Integrasi berasal dari Bahasa Inggris "*integrare*" yang artinya memberikan tempat pada suatu keseluruhan. Berawal dari kata kerja yang diubah menjadi kata benda sehingga integritas didefinisikan sebagai keutuhan. Pada kata yang serupa dibentuk kata sifat yaitu integer yang artinya utuh. Maka dari itu, integrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyesuaian yang termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat yang mampu menghasilkan pola kehidupan yang serasi (Stepen Hill, 2010:284).

Dalam buku sosiologi sistematika milik Hendropuspito (1989:256) dikatakan bahwa integrasi sosial merupakan sebuah kesatuan dari kehidupan yang beragam dengan adanya etnis, budaya, ideologi dan norma yang ada untuk melakukan fungsi sosio budaya yang besar dan tidak berpengaruh pada kebhinekaan. Suatu proses dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kelompok yang tidak akan pernah ada akhirnya serta berlangsung secara kontinu dapat dilakukan dengan beberapa fase yaitu akomodasi, kerja sama, koordinasi dan asimilasi. Integrasi sosial ini akan mempermudah dalam pencapaiannya saat masyarakat mampu menjadi anggota dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki resiko lebih besar dibanding dengan yang seharusnya diterima. Kelompok ini memberikan arahan yang jelas tentang perilaku serta sanksi yang diberikan jika adanya pelanggaran nilai dan norma yang sudah disepakati sebelumnya.

1.1.2.2 Bentuk-bentuk Integrasi Sosial

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Elly Setiadi (2011), integrasi sosial diklasifikasikan dalam empat wujud yaitu:

- a. Akulturasi (*Acculturation*) merupakan proses dimana seorang individu menerima pengetahuan, standar budaya serta kompetensi yang diperlukan untuk melakukan interaksi dengan sukses dalam lingkungan masyarakat.
- b. Penempatan (*Placement*) artinya seseorang individu memperoleh posisi dalam masyarakat dalam sistem pendidikan maupun ekonomi baik dalam profesi atau sebagai warga biasa.
- c. Interaksi (*Interaction*) merupakan pembentukan dari suatu hubungan serta jaringan oleh individu yang melakukan *sharing* orientasi secara Bersama.
- d. Identifikasi (*Identification*) ini mengacu pada tindakan identifikasi kepada individu dengan adanya system sosial. Identifikasi ini memiliki aspek kognitif dan emosional.

1.1.2.3 Proses Integrasi Sosial

Menurut Elly Setiadi (2011) terdapat beberapa tahapan yang harus di lewati pada suatu proses integrasi sosial yaitu:

a. Akomodasi

Akomodasi merupakan sebuah suatu cara yang memiliki dua maupun lebih individual atau kelompok yang satu sama lain melakukan penyesuaian diri, tidak untuk saling mengganggu dengan cara menjaga, mengurangi dan menghentikan ketegangan yang bisa saja timbul maupun sudah terjadi sehingga mampu mencapai kestabilan. Akomodasi ini memiliki tujuan agar mengurangi adanya pertentangan diantara dua kelompok maupun individu, melakukan pencegahan kelompok sosial dan melakukan upaya peleburan kelompok sosial yang terpisah.

b. Kerja sama

Kerja sama ini merujuk pada bentuk interaksi sosial yang utama. Kerja sama mampu memberikan gambaran dari sebagian besar bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan diantara dua maupun lebih individu dimana perilaku tersebut mampu memberikan pengaruh, mengubah maupun memperbaiki dari perilaku individu tersebut. Kerja sama yang dimaksudkan disini

merupakan media usaha bersama antara pribadi dan kelompok masyarakat dalam upaya mencapai satu sampai beberapa tujuan bersama.

c. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu aturan yang secara pusat dilaksanakan untuk memperoleh integritas dengan cara menyatukan individu atau kelompok supaya mencapai sebuah keseimbangan dalam menjalin suatu hubungan di masyarakat. Tanpa adanya komponen koordinasi, suatu proses sosial kemasyarakatan dalam hal hubungan masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar sebab dengan adanya koordinasi mampu ditemukan titik temu antar permasalahan yang sudah atau pernah terjadi diantara masyarakat satu dengan lainnya.

d. Asimilasi

Asimilasi adalah suatu proses integrasi sosial yang ditandai dengan adanya usaha dalam hal mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada dalam orang perorangan atau kelompok masyarakat dengan harapan mampu mencapai suatu kesepakatan yang dilandaskan pada kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Golongan yang tersangkut pada sebuah proses asimilasi merupakan golongan yang memiliki mayoritas di beberapa golongan minoritas. Di bagian ini, golongan minoritas merupakan masyarakat baru yang akan memberikan perubahan pada sifat khas dari unsur kebudayaan serta melakukan penyesuaian pada budaya dari golongan mayoritas.

1.1.2.4 Syarat-syarat Integrasi Sosial

William F. Ogburn yang diikuti oleh Kamanto Sunarto memberikan gambaran bahwa syarat berhasilnya sebuah integrasi sosial adalah dimana anggota masyarakat ini merasa telah berhasil mengisi kebutuhan satu dengan lainnya. Selain itu, masyarakat telah berhasil membuat kesepakatan bersama mengenai norma-norma serta nilai sosial yang bisa menjadi tuntunan serta masyarakat telah melakukan nilai dan norma tersebut dengan konsisten.

Integrasi sosial akan terbentuk jika di masyarakat ini sebagian besar memiliki konsensus mengenai batas wilayah tinggal mereka. Sebagian besar masyarakat setuju

akan struktur sosial yang dibangun misalnya nilai, norma, sistem religi yang berlaku di masyarakat.

1.1.2.5 Faktor yang Mendukung Integrasi Sosial

Faktor yang mampu mendukung adanya integrasi sosial antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Homogenitas masyarakat. Masyarakat dengan homogenitas yang rendah, integrasi sosial akan sangat mudah diraih. Sebaliknya, jika masyarakatnya sangat majemuk, integrasi sosial akan sangat sulit dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, semakin homogen akan semakin mudah juga integrasi sosial di masyarakat tersebut.
- b. Besar kecilnya masyarakat. Dalam masyarakat kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosial mudah diraih. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya hubungan sosial diantara anggotanya yang terjadi secara intensif sehingga komunikasi dan tukar budaya semakin melesat.
- c. Mobilitas geografis. Anggota masyarakat jika menjadi anggota baru harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang dituju. Namun, semakin sering anggota masyarakat ini datang dan tidak maka semakin sulit juga integrasi sosial. Sementara, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah akan mengakibatkan integrasi sosial mudah terjadi.
- d. Efektivitas komunikasi. Hal ini juga meningkatkan integrasi sosial sebab semakin efektif komunikasi berlangsung maka semakin mudah integrasi sosial terjadi.

1.2 Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Penelitian yang dilaksanakan oleh **Ridwan, Universitas Siliwangi 2021 dengan judul “Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pupuk organik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (studi di Desa Pamokolan, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis)”**. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan pupuk organik sebagai objek penelitiannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Desa Pamokolan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh **Esi Novita, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2017 dengan judul “Analisis pelaksanaan Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Kampar”** dalam penelitian ini dijelaskan tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bisa berjalan atau bahkan sebaliknya, serta ingin mengetahui beberapa hambatan dari program tersebut.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh **Yuyun Tri Wiranti, Umi Sholikah, Soleh Ardiansyah, Institut Teknologi Kalimantan 2019 dengan judul “Peningkatan Budaya Gotong Royong Masyarakat Kampung Warna-Warni Teluk Seribu Balikpapan Melalui Program Kemitraan Masyarakat”** dalam penelitian ini menjelaskan kreativitas masyarakat dan pemerintah yang mengubah tempat kumuh menjadi kampung warna-warni, tetapi seiring dengan berjalannya waktu tempat itu pun tidak dirawat sebagaimana mestinya padahal itu setelah adanya destinasi wisata tersebut tingkat perekonomian masyarakat mengalami peningkatan tetapi karena tidak dirawat tempat yang menjadi objek wisata itu pun sepi. Berdasarkan permasalahan tersebut pihak mitra menawarkan solusi peningkatan budaya gotong royong masyarakat untuk kampung warna-warni, program kemitraan masyarakat itu dilakukan agar terciptanya gerakan masyarakat yang berkelanjutan dalam menjaga destinasi wisata tersebut.
- d. **Eva Nur Hidayah** melakukan penelitian pada Tahun 2020 dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat”** memberikan informasi bahwa kegiatan BBGRM di Kelurahan Sampangan termasuk ke dalam kategori baik. Terdapat beberapa alur yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dimana alurnya adalah 1) adanya pengorganisasian tim oleh LPMK, 2) musyawarah dengan adanya Musrenbangkel, 3) pelaksanaan memiliki focus di bidang ekonomi, budaya, sosila, masyarakat 4) adanya pembinaan yang dilakukan langsung oleh lurah pada saat rakor, 5) adanya pengawasan khusus.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh **Edi Siswanti dan Edi Setiawan Tahun 2009** mengenai “**Implementasi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Meningkatkan Gerakan Gotong Royong (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kabupaten Situbondo)**”. Hasil yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan dari masyarakat desa yang berada di tepi pantai.

1.3 Kerangka Konseptual

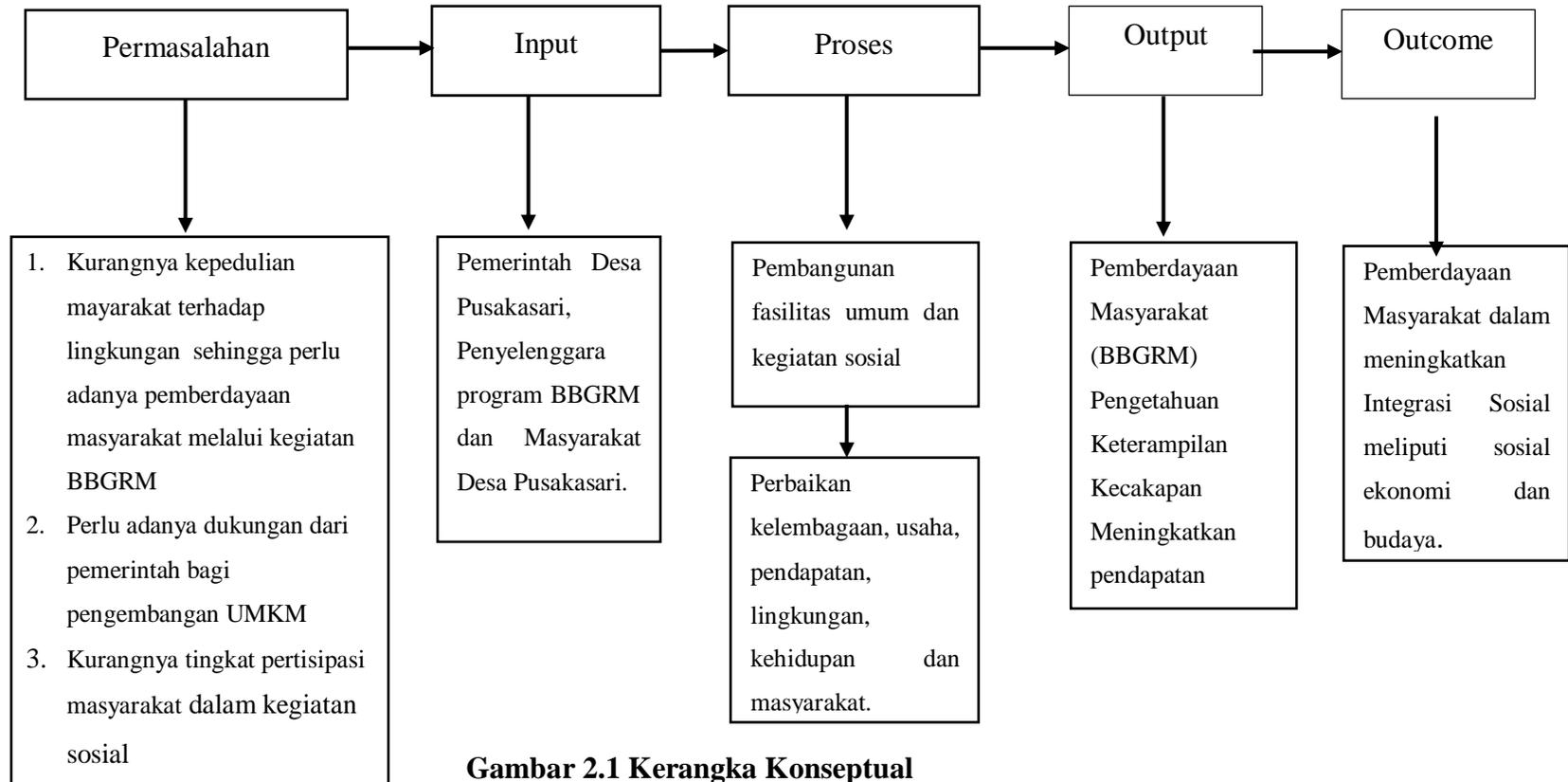
Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa hubungan antara suatu konsep dengan lainnya dari masalah yang akan diteliti untuk menyatukan dan menjelaskan dengan runtut mengenai topik yang akan dibahas. Konsep penelitian yang akan dilakukan ini berawal dari kurangnya pola hubungan masyarakat dalam menanggapi berbagai perbedaan yang ada di Desa Pusakasari yang pada tahun 2021 dengan diadakan program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), berharap hal ini mampu memberikan dampak dari program tersebut berkaitan dengan ketercapaian pemberdayaan masyarakat apakah sudah dikatakan tercapai atau tidak.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya dari adanya tindakan sosial dari suatu organisasi yang terorganisir dalam perencanaan serta tindakan untuk mencari pemecahan masalah serta pemenuhan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang tidak memiliki kekuatan maupun tidak memiliki keberuntungan. Dalam hal ini, pemberdayaan merujuk pada alokasi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan merupakan suatu proses dimana orang menjadi kuat untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai hal serta mempengaruhi kehidupannya.

Perubahan sosial sebagai salah satu dampak dari globalisasi memberikan pengaruh pada nilai-nilai yang sudah ada menjadikan sebuah pegangan serta acuan dalam hubungan sosial berlandaskan pada semangat dan nilai gotong royong semakin kurang, kepekaan sosial memudar dan kesadaran saling membantu mulai luntur. Merujuk pada hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 memberikan instruksi pada semua Desa Kelurahan di Indonesia untuk melaksanakan program Bulan

Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dalam pelaksanaannya, program ini perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini, rencana program akan tersusun dengan arah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Terlaksananya program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diharapkan dapat memberikan dampak ditengah masyarakat Desa Pusakasari Kabupaten Ciamis untuk membentuk integrasi sosial yang tinggi dengan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kerangka konseptual yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut



1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dikemukakan diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) terhadap proses integrasi sosial di masyarakat Desa Pusakasari Kabupaten Ciamis.